

**BAB II**

**PENDEKATAN KEAMANAN SEKTOR POLITIK YANG**

**MEMPENGARUHI KEBIJAKAN MALAYSIA DI PELABUHAN**

**JOHOR**

Bab ini akan menjelaskan apa yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Malaysia pada masa Mahathir Mohamad kembali naik menjadi Perdana Menteri melalui pendekatan konsep milik Buzan dkk. Buzan dkk bahwa sektor politik lebih menekankan kedaulatan negara yang mana ada dalam agenda militer sesuai dengan ancumannya. Tetapi, karena sektor militer memiliki bagian tersendiri, sektor politik lebih terfokus terhadap ancaman non-militer (Buzan, Waeber, & de Wilde, 1998, hal. 140-143).

Dalam hal ini, Malaysia sebagai aktor politik merasa memiliki kepentingan nasional yang harus dicapai. Kedaulatan wilayah menjadi keutamaan untuk memperoleh kekuasaan yang absolut. Pelabuhan Johor merupakan wilayah strategis yang terletak di Selat Johor. Selat tersebut merupakan jalur perdagangan Malaysia. Dengan adanya kebijakan tersebut, tentunya menjadi sebuah keuntungan bagi Malaysia dalam lalu lintas perdagangan serta luas wilayah bertambah.

Dimulai dengan negara berdaulat, yang membentuk sebagian besar sektor politik, kita dapat melihat masalah ancaman dan kerentanan melalui argumen bahwa suatu negara terdiri dari tiga komponen: ideologi, bentuk fisik, dan institusi. Mengurangi masalah-masalah yang masuk ke dalam sektor lain (sebagian besar ancaman yang dibuat langsung dalam bentuk fisik harus militer, ekonomi atau lingkungan), kita dibiarkan dengan ideologi (kecuali identitas ideologi independen dari institusi) dan institusi sebagai pertanyaan dari ideologi di mana lembaga-lembaga politik dibangun (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

Ideologi yang dimiliki negara secara bersama adalah bersifat nasionalisme, terutama nasionalisme sipil tetapi kadang-kadang ethno-nasionalisme dan ideologi politik. Dengan mengancam suatu ideologi, seseorang dapat mengancam stabilitas tatanan politik (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

Ancaman seperti itu mungkin dengan struktur pemerintahan yang ada dengan mempertanyakan Ideologi yang melegitimasi terhadap integritas teritorial negara (mendorong pembelotan dari identitas negara) atau ke-keberadaan negara itu sendiri (dengan mempertanyakan haknya atas otonomi). Bagi negara, ada fokus pengorganisasian, untuk sebagian besar hal ini — kedaulatan. Ancaman yang ada pada suatu negara adalah mereka yang pada akhirnya melibatkan kedaulatan, karena kedaulatanlah yang mendefinisikan negara sebagai “negara”. Ancaman untuk

menyatakan ke-berlangsungan hidup (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

Oleh karena itu ancaman terhadap kedaulatan. Bahkan pelanggaran kecil terhadap kedaulatan adalah ancaman, karena kedaulatan adalah prinsip yang mengklaim pada kekuasaan yang tertinggi hak pemerintahan sendiri. Dengan demikian, ia menjadi terancam jika menjadi parsial dalam arti apa pun. Apa pun yang bisa digambarkan sebagai Pelanggaran kedaulatan (intervensi) dapat disajikan sebagai masalah keamanan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

## **2.1 Faktor Ideologi**

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Buzan menganggap pelanggaran hal sekecil apapun ialah ancaman bagi kedaulatan suatu negara. Ancaman tersebut bisa dalam bentuk intervensi dari entitas lainnya, kebijakan serta dalam bentuk militer yang penyelesaiannya menggunakan upaya politik. Buzan menganggap bahwa Ideologi merupakan suatu tatanan sosial yang kuat dan diperlukan dalam upaya pembangunan negara. Ideologi merupakan penyatuan dari keberagaman suatu kelompok sosial yang berada di satu kawasan. Maka dari itu, Ideologi harus mampu dipertahankan dan dilestarikan pemahamannya (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

Pemerintah PAP telah bersusah payah untuk mempresentasikan prinsip meritokrasi dan pragmatismenya sebagai alternatif yang layak

untuk demokrasi liberal dan kompetisi multi-partai, kadang-kadang dengan menggambar dari gagasan yang beragam tentang nilai-nilai Konfusianisme dan budaya Asia untuk membangun benteng ideologis seperti "demokrasi Asia" terhadap kritik terhadap apa yang disebut liberal Barat. Dengan mengkredit demokrasi dan pragmatisme untuk menciptakan kondisi yang tepat untuk keberhasilan ekonomi, pemerintah PAP tidak hanya dapat membenarkan defisit demokrasinya (liberal), tetapi juga menghasilkan sumber daya ideologis dan struktur otorisasi untuk pemeliharaan rejim dominan satu partai. Dalam istilah 'pragmatis', kesuksesan ekonomi Singapura yang cukup besar adalah pembenaran yang cukup untuk sarana otoriterinya. Kepercayaan masyarakat secara keseluruhan terhadap prinsip-prinsip ini menciptakan kondisi untuk kepatuhan politik, penerimaan kebijakan yang tidak populer, dan sikap apatis politik, secara umum (Tan, 2011, hal. 69-72).

Institusi resmi pemerintahan perwakilan Singapura adalah warisan kolonial, yang secara fundamental didasarkan pada sistem pemerintahan parlementer Westminster. Di Singapura, eksekutif memiliki kekuatan lebih besar daripada legislatif. Secara teratur mengadakan pemilihan politik sejak tahun 1959, berjalan sesuai dengan sistem pemungutan suara pluralitas yang sederhana, sehingga PAP tetap berkuasa dan sejumlah kecil anggota parlemen dari parlemen yang terpilih sebagai oposisi (Tan, 2011, hal. 69-72).

Dengan mayoritas besar di parlemen, pemerintah PAP mampu mengubah konstitusi tanpa banyak halangan, memperkenalkan konstituensi multi-anggota, keanggotaan parlemen yang tidak dipilih, dan perubahan kelembagaan lainnya yang, pada dasarnya, memperkuat dominasi pemilihan pemerintah dan kontrol parlemen. Dengan incumbency, muncul keuntungan pemilihan umum yang telah mengamankan posisi PAP. Dari lokasi yang kuat ini, ia telah secara efektif menyebarkan gagasan bahwa lebih penting bagi negara kecil dengan sumber daya dan bakat yang terbatas untuk memiliki pemerintahan yang meritokratis, pragmatis, dan berorientasi ekonomi daripada yang pada akhirnya dibatasi oleh prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan check and balance. Gaya pemerintahan Singapura yang otoritarian serta kapitalis ini adalah alasan Singapura menjadi negara yang kuat seperti saat sekarang (Tan, 2011, hal. 69-72).

Kesadaran untuk mewujudkan perpaduan masyarakat di negara seperti di Malaysia ini adalah tanggung jawab yang berat. Teras utama untuk mewujudkan perpaduan masyarakat Malaysia adalah untuk menyadari bahwa manusia itu dijadikan Allah SWT berbangsa-bangsa, berkaum-kaum, bersuku-suku dan sebagainya. Hakikat ini adalah sebenar-benarnya untuk menambahkan nilai-nilai kehidupan, saling mempelajari, saling berinteraksi, dan saling bertolak belakang. Namun, manusia akan menggunakan perbedaan ini untuk mencetuskan konflik. Dengan begitu, Rukun Negara yang dibentuk oleh pimpinan Malaysia

adalah untuk mengatasi segala perbedaan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Oleh itu, unsur-unsur yang terkandung dalam Rukun Negara tidak menampakkan hak milik suatu golongan. Ia bersifat umum dan mencoba untuk membina lingkaran yang luas, sehingga pada titik akhirnya dapat mengatur tata kelakuan, mengendalikan, dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan yang sebenarnya bercirikan Malaysia (Aziz, 2010, hal. 447-449).

Ketika Malaysia memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957, Cina pindah untuk membangun hubungan diplomatik, tetapi Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman menolak karena dukungan China untuk Partai Komunis Malayan (MCP). Malaysia dan Inggris baru saja muncul dari lebih dari satu dekade pertempuran MCP di pemberontakan yang dikenal sebagai Darurat. Karena mayoritas MCP adalah etnis Cina pada saat populasi Malaysia sekitar 50 persen Melayu, 45 persen Orang Cina, dan 5 persen orang India, etnis dan ideologi tumpang tindih untuk menghasilkan persepsi tentang Cina sebagai ancaman (Noor & Qistina, 2017, hal. 201-202).

Tawar-menawar besar yang telah dilanda kemerdekaan untuk mempertahankan stabilitas politik di masyarakat majemuk Malaysia memberikan kewarganegaraan etnis Tionghoa sebagai imbalan atas pengakuan supremasi politik Melayu dan janji untuk tidak menantang. Campur tangan Cina dalam politik Malaysia yang dipadukan dengan persepsi ambisi ekspansionisnya di Asia membuat para pemimpin Melayu

seperti Tunku memandang Cina sebagai ancaman eksistensial (Noor & Qistina, 2017, hal. 201-202).

Lima prinsip Rukun Negara yang diwujudkan ini adalah dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Prinsip-prinsip yang terbina ini adalah bagi memperkukuhkan perpaduan kaum (Aziz, 2010, hal. 447-449).

**a) Kepercayaan kepada Tuhan**

Agama dijadikan pegangan utama rakyat Malaysia kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang, sesuatu bangsa dan juga negara. Pegangan yang kukuh terhadap agama akan dapat menahan seseorang itu daripada melakukan jenayah dan juga kejahatan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi Persekutuan, tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman.

Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam Rukun Negara (Aziz, 2010, hal. 447-449).

**b) Kesetiaan Kepada Raja dan Negara**

Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Parlemerter dan Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong

sebagai Ketua Negara dan sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri, dan Yang di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. Seri Paduka Baginda, Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat. Maka setiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong (Aziz, 2010, hal. 447-449).

**c) Keluhuran Perlembagaan**

Prinsip ini menekankan kewajiban rakyat untuk menerima, dengan mematuhi lalu berupaya untuk mempertahankan keluhuran atau kemuliaan Perlembagaan Negara.

Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat

negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara.

Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai lalu memahami maksud dengan kandungan nilai yang ada didalamnya

serta latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Negara (Aziz, 2010, hal. 447-449).

**d) Kedaulatan Undang-Undang**



Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Undang-undang negara berasaskan kepada Perlembagaan. Oleh itu kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Oleh itu undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Tuntutan kepada prinsip keempat ini adalah supaya kita sama-sama menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguat kekuasaannya serta memelihara kedaulatannya (Aziz, 2010, hal. 447-449).

Menurut Buzan, ancaman politik ditujukan pada stabilitas organisasi negara tujuannya dapat berkisar dari menekan pemerintah pada kebijakan tertentu, melalui penggulingan pemerintah, untuk memicu pemisahan diri, dan mengganggu tatanan politik negara sehingga melemahkannya sebelum militer menyerang. Gagasan negara, terutama identitas nasionalnya dan pengorganisasian ideologi, dan lembaga yang mengungkapkannya adalah hal yang normal target ancaman politik. Karena kehidupan negara merupakan entitas yang pada dasarnya politis, ancaman politik mungkin sama takutnya dengan ancaman militer, khususnya jadi jika, targetnya adalah keadaan lemah. Ini menunjukkan bagaimana mungkin mendefinisikan keamanan politik tetapi juga bagaimana sulit untuk membatasi, terutama dalam kaitannya dengan masyarakat dan militer keamanan, sosial ditunjukkan oleh

penyebutan identitas nasional, dan militer sangat jelas di seluruh (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 142).

Biasanya, ancaman politik adalah tentang memberi atau menolak pengakuan, dukungan, atau legitimasi (yang menjelaskan mengapa dimungkinkan untuk memiliki murni ancaman politik yaitu, ancaman yang tidak menggunakan militer, ekonomi, atau lainnya, berarti dari sektor lain, kata-kata penting dalam kaitannya dengan pengakuan dan tuntutan politik terkait. Di mana sesuai dengan tindakan Malaysia yang menerapkan ideologinya yaitu Rukun Negara secara tegas yang terdapat prinsip-prinsip di dalamnya. Juga menurut Buzan, agar tercapai suatu kepentingan nasional harus adanya kekuatan dalam ideologinya yang mana penerapan aspek dalam nilai yang terkandung tidak dapat dipatahkan. Rukun Negara sendiri bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu, tanpa mengucilkan suatu kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang mapan akan dapat membantu negara meningkatkan dan mempergiatkan pertumbuhan ekonomi, mengekalkan kestabilan politik dan sistem pemerintahan negara yang demokratik. (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 142).

Malaysia dan Singapura merupakan dua negara berbeda dalam bentuk perpolitikannya juga dengan ideologinya. Malaysia, dengan ideologi Rukun Negaranya telah merepresentasikan demokrasi ala Malaysia sendiri yang berpegang teguh terhadap agama, adat,

pemerintah dll. Sedangkan Singapura, Hasil dari buah tangan bapak pendiri mereka yaitu Lee Kwan Yew adalah suatu kesuksesan yang luar biasa. Beliau mampu menggabungkan pemerintah yang otoritarian dengan ekonomi yang kapitalis. Namun, hal itu menjadi suatu masalah tersendiri bagi Singapura karena kebebasan politik yang minim membuat oposisi menjadi lemah dan tak mampu untuk melawan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 142).

Singapura, yang pada awalnya adalah suatu wilayah yang berada di ujung selatan hanyalah sebuah kota pelabuhan yang dijadikan oleh Kerajaan Inggris. Mereka tergabung dengan Malaysia karena sesama dijajah kolonial Inggris. Namun setelah kolonial pergi dan Singapura memisahkan diri dengan Malaysia menimbulkan masalah serius bagi perekonomian serta hubungan politik mereka dengan Malaysia.

Maka dari itu, bagi Malaysia, protes keras yang ditujukan terhadap mereka oleh Singapura dapat mengganggu keamanan ideologi serta kedaulatan Malaysia sendiri. Protes tersebut jika Malaysia

mengabaikannya akan berbuntut panjang dalam situasi polugri kedua negara khususnya Malaysia. Pembentukan kebijakan itu ialah hasil dari konsep ideologi mereka yang demokratis demi kepentingan rakyat.

Seperti yang telah dipaparkan oleh Buzan dkk, bahwa, ancaman sekecil apapun terhadap suatu ideologi negara merupakan suatu ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara. Yang mana, dalam hal ini perlu adanya penyelesaian masalah secara cepat. Karena, jika tidak

ditangani secara cepat dan tepat, akan mengganggu keutuhan negara serta membuat masyarakat merasa was-was jika sewaktu-waktu negara dapat runtuh (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-151).

## 2.2 Faktor Institusi

Ancaman terhadap sebuah institusi sebuah negara dengan kata lain sebuah pemerintahan menurut Buzan ialah adanya ancaman integritas teritorial negara (adanya pembelotan terhadap identitas negara), atau eksistensi negara itu sendiri (dengan mempertanyakan haknya atas otonomi). Sebagaimana telah dibahas, ancaman politik membawa maju salah satu dari subversi legitimasi atau penolakan pengakuan (baik penolakan total atau penolakan kesetaraan kedaulatan) (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150).

Pada tanggal 25 Oktober 2018, Malaysia mengeluarkan kebijakan perluasan wilayah pelabuhan Johor Bahru melalui Federal Government Gazette yang ditandatangani oleh Menteri Transportasi Malaysia Loke Siew Fook (Reuters, 2018).

Kebijakan ini di protes keras oleh Singapura. Menurut Singapura, rencana itu akan memasuki wilayah negara kota tersebut. Pernyataan itu menjadi perkembangan terbaru pertikaian atas oleh kedua negara atas Selat Singapura. Pemerintah Singapura juga menuturkan bahwa kapal-kapal Malaysia sering memasuki perairan Singapura di lepas pantai Tuas tanpa izin semenjak kebijakan tersebut di keluarkan. Pemerintah Singapura tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap

tindakan tersebut dan siap menyelesaikan masalah secara damai dengan hukum internasional (Reuters, 2018).

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke Siew Fook, menyebut bahwa klaim Singapura terhadap wilayah tersebut tidak akurat. Dia mengatakan perubahan tersebut tidak mengambil wilayah dari Singapura. Batas-batas pelabuhan Johor Bahru masuk dalam wilayah perairan Malaysia dan ini adalah hak Malaysia untuk membuat batas-batas pelabuhan di wilayah perairan kami, salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia (Reuters, 2018).

Malaysia terlihat berupaya mengedepankan kepentingan nasionalnya di sini dengan menyangkal klaim Singapura terhadap wilayah yang dianggap milik Singapura. Malaysia tetap mempertahankan wilayahnya atas dasar kedaulatan nasional. Upaya politik pun juga ditempuh oleh Malaysia dalam konflik dengan Singapura. Kedua Menlu negara yaitu Saifudin Abdullah dari Malaysia dan Vivian Balakrishnan dari Singapura sepakat menjalani Dialog dalam situasi kondusif pada bulan Januari 2019. Hasil dari pertemuan dari kedua negara itu didapat bahwa Malaysia menyetujui penangguhan larangan melintas bagi pesawat sipil yang selama ini diterapkan pada wilayah Pasir Gudang dalam waktu dekat. Serta Singapura, sepakat menangguhkan penerapan prosedur Sistem Instrumen Pendaratan (ILS) yang berlaku di bandara Seletar, hasil tersebut berlaku dalam satu bulan kedepan. Kedua negara juga sepakat membentuk kelompok bersama

demi membahas dan mempelajari masalah aturan serta operasional terkait sengketa perairan juga akses pelabuhan (CNN Indonesia, 2019).

Tindakan Malaysia tersebut, menurut Buzan dkk dijelaskan dalam bukunya, bahwa dalam sektor politik memungkinkan penyelesaian masalah politik tanpa penggunaan kekuatan militer. Juga tanpa mengancam keberlangsungan lingkungan, sosial serta ekonomi. Disini negara, memperkuat otoritasnya masing-masing dalam hubungan luar negerinya (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 141-143).

Pada perdebatan antara Weber dan Laclau akan menjelaskan bagaimana tindakan Malaysia dalam penerapan faktor institusi. Perlu adanya elaborasi dalam pemahaman politik itu sendiri. Yang menjadi kontroversi dalam perdebatan ini ialah dalam mengidentifikasi politik dengan stabilisasi politik atau ketidakstabilan politik. Maksudnya disini, apakah dalam prakteknya, politik dilihat menurut situasi terkini yang terjadi. Satu pihak lainnya dalam perdebatan ini, melihat politik sebagai alat untuk mengamankan kepentingan atau kebijakan sebuah institusi atau negara dan untuk kestabilan sebuah otoritas. Ketika kebijakan yang diberikan bersifat permanen, itulah hasil yang dicapai dalam hubungan politik. Sedangkan Laclau secara garis besar melihat politik sebagai upaya bentuk Politisasi atau Sekuritisasi. Malaysia dalam hal ini, menerima ajakan Singapura untuk berdiskusi, membentuk kelompok bersama serta pertemuan kedua Menlu merupakan upaya mempertahankan aturan atau kebijakan yang mereka buat yang mana

ditentang Singapura. Kebijakan tersebut “diamankan” dengan adanya penangguhan kebijakan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 141-143).

### 2.3 Faktor Bentuk Fisik (Wilayah)

Malaysia tidak cocok disebut sebagai Negara Maritim. Wilayah laut yang mereka miliki tidaklah luas. Oleh karenanya, Malaysia sangat menyadari hal itu dan tidak ingin kehilangan sekecil apapun dari maritimnya. Kebijakan tersebut menegaskan wilayah kedaulatan maritim Malaysia. Mengacu pada kasus lalu bersama Singapura terkait kepemilikan Pedra Branca yang dimenangkan Singapura di ICJ (Affairs, 2019).

Buzan sendiri mengatakan kedaulatan negara merupakan asas terpenting terjaganya keutuhan sebuah negara. Negara dapat dikacaukan oleh konflik kedaulatan atau wilayah. Kedaulatan sendiri merupakan salah satu terbentuknya suatu negara. Seperti yang terdapat dalam "Security Agenda", aktor eksternal mungkin sering bertujuan mengganggu dari kedaulatan dalam tindakan suatu negara, tetapi logika dalam sekuritisasi yang berkemungkinan akan terjadi akan tetap fokus pada kedaulatan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-152).

Dalam beberapa kasus, Dunia internasional dapat melegitimasi intervensi dengan mengacu pada genosida, agresi, atau, semakin, hanya kekurangan "good governance". Dalam kasus seperti itu, sekuritisasi ganda sedang dimainkan. Itu Pemerintah pasti akan memprotes karena

kedaulatannya telah dilanggar (bukan dengan mencoba memperdebatkan haknya untuk melakukan genosida tetapi dengan mengklaim hak untuk melakukan apa pun yang diputuskan di dalam negeri). Di sisi lain, dunia internasional akan bertindak dengan mengacu pada beberapa prinsip yang diduga telah dilanggar; karena pelanggaran kedaulatan dan non-intervensi suatu langkah drastis ke sistem state modern, aktor yang melakukan intervensi akan melakukannya harus membuat daya tarik yang kuat dan luar biasa (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 150-152).

Dalam kasus ini, faktor wilayah cukup mempengaruhi eskalasi dari konflik tersebut. Batas-batas wilayah antara Malaysia dan Singapura merupakan peninggalan kolonial Inggris. Kedua negara sering terlibat dalam konflik wilayah. Wilayah selatan Malaysia yaitu Johor memiliki jarak yang cukup dekat dengan Singapura. Perbatasan kedua negara di wilayah ini dianggap rawan terhadap konflik. Protes dari Singapura merupakan suatu respon yang wajar. Mengingat, juga sudah ada perjanjian mengenai wilayah ini antar kedua negara. Untuk itu, menurut Buzan, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi bentuk fisik atau wilayah. "Good Governance" dapat mempengaruhi keamanan dari wilayah atau kedaulatan suatu negara. Tatanan politik serta pengelolaan pemerintah yang kuat dapat menjaga suatu negara terhadap ancaman wilayah yang ditujukan untuk mengganggu stabilitas keamanan (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 152)



Selain itu, dunia internasional juga dapat mempengaruhi dari keamanan suatu wilayah negara. Dunia internasional yang dimaksudkanialah seperti organisasi yang terdiri atas negara atau negara itu sendiri, seperti intervensi PBB dalam penanganan masalah Israel-Palestina. Dalam kasus Johor ini, jika konflik tersebut tidak terselesaikan, kedua negara dapat mengajukan kepada ICJ sebagai institusi hukum internasional tertinggi. ICJ akan menjadi pihak ketiga dalam penyelesaian konflik Johor (Buzan, Waever, & de Wilde, 1998, hal. 152).

**Tabel 2.1 Rangkuman dari Analisis berdasarkan konsep pendekatan keamanan milik Buzan**

No	Indikator	Sikap Malaysia
1	Ideologi	Mempertahankan Kebijakan perluasan wilayah tersebut karena merupakan hasil dari konsep negara Malaysia yaitu Rukun Negara.

2	Bentuk Fisik ( Wilayah )	Penerapan kebijakan perluasan wilayah tidak dibatalkan. Ditangguhkan untuk sementara sampai konflik selesai.
3	Institusi	Mengadakan hubungan kerjasama dengan Singapura untuk menyelesaikan konflik.

Diolah dari buku Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde.

Dapat disimpulkan, berdasarkan penjabaran melalui konsep Buzan, Ideologi, Institusi, dan Bentuk Fisik di dapat beberapa tindakan Malaysia terhadap konflik tersebut. Kebijakan perluasan wilayah tersebut merupakan hasil dari konsep negara Malaysia yaitu Rukun Negara. Lalu. Penerapan kebijakan perluasan wilayah tidak dibatalkan, ditangguhkan untuk sementara sampai konflik selesai. Yang terakhir, Mengadakan hubungan kerjasama dengan Singapura untuk menyelesaikan konflik. Untuk bab selanjutnya akan masuk kedalam pembahasan dalam sektor keamanan ekonomi.